



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.81, 2012

AGREEMENT. Pengesahan. Republik Indonesia.
Republik Argentina. Pembebasan Visa. Paspor
Diplomatik. Dinas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA MENGENAI PEMBEBASAN
VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC ON VISA EXEMPTION FOR
HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL OR SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Buenos Aires, Argentina, pada tanggal 24 Agustus 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Argentine Republic on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official or Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL OR SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Argentine Republic on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official or Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2011 di Buenos Aires, Argentina, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

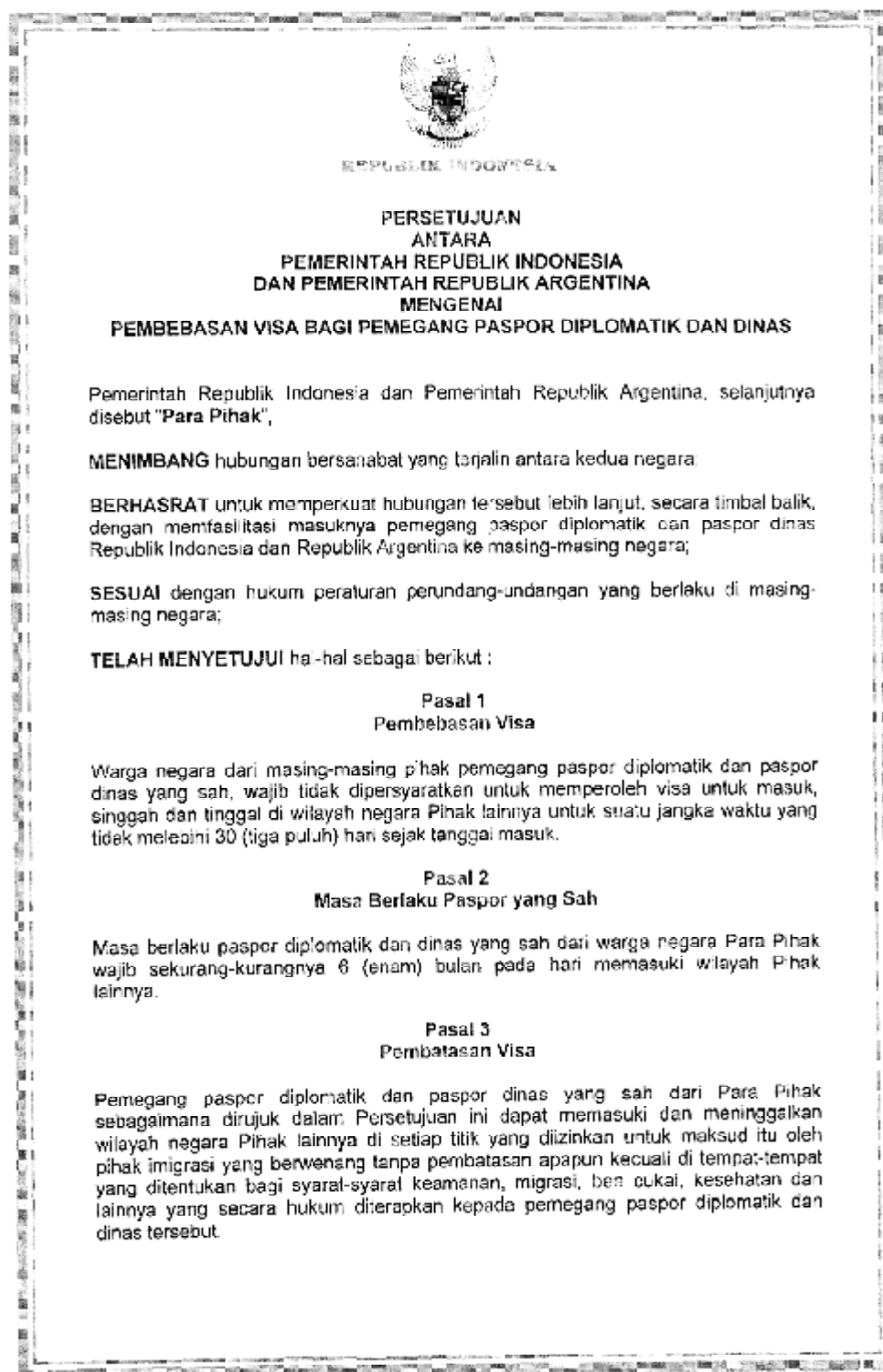
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



Pasal 4
Visa Bagi Anggota Misi Diplomatik dan Konsuler

Warga negara dari salah satu pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik dan dinas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

Pasal 5
Hak Pihak Berwenang

1. Persetujuan ini wajib tidak membebaskan warga negara Para Pihak dari kewajiban untuk menghormati peraturan perundang-undangan negara Pihak lainnya berkenaan dengan masuk, tinggal dan perginya orang asing.
2. Para Pihak berhak untuk menolak untuk memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang dianggap tidak dikehendaki atau dapat membahayakan ketenteraman umum, ketertiban umum, kesehatan publik atau keamanan nasional.

Pasal 6
Penangguhan

Masing-masing Pihak dapat menangguhkan Persetujuan ini baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan publik. Pengenalan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya melalui saluran diplomatik.

Pasal 7
Contoh dan Penerbitan Paspor atau Dokumen Perjalanan

1. Para Pihak wajib saling bertukar melalui saluran diplomatik, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, contoh-contoh paspor diplomatik dan dinas yang sah.
2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik dan dinas baru, serta modifikasi terhadap yang telah ada, para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis, melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.

Pasal 8
Penyelesaian Sengketa

Setiap perbedaan atau sengketa yang timbul terhadap penafsiran atau pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan Para Pihak.

Pasal 9
Perubahan

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, apabila dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan atau revisi dimaksud wajib mulai berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dari Persetujuan ini, dan merupakan suatu kesatuan dari Persetujuan ini.

Pasal 10
Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran

1. Persetujuan ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir secara tertulis dimana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan nasionalnya telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

Yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Buenos Aires pada tanggal 24 Agustus 2011, rangkap dua dalam bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA


DR. R.M. Marty M. Natalegawa
Menteri Luar Negeri

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
ARGENTINA


Héctor Marcos Timerman
Menteri Luar Negeri, Perdagangan
Internasional dan Agama



REPUBLIK INDONESIA

**ACUERDO
ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA
Y
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
SOBRE
EXENCIÓN DE VISAS PARA TITULARES DE PASAPORTES
DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES O DE SERVICIO**

El Gobierno de la República de Indonesia y el Gobierno de la República Argentina, en adelante denominados "las Partes",

RECONOCIENDO los lazos de amistad existentes entre ambos países;

DESEOSOS de fortalecer aún más dichas relaciones, sobre una base de reciprocidad, facilitando el ingreso de titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio de la República de Indonesia y la República Argentina en sus respectivos países, y

DE CONFORMIDAD CON las leyes y reglamentaciones en vigor de los respectivos países,

HAN ACORDADO lo siguiente:

**Artículo 1
Exención de visas**

Los nacionales de cualquiera de las Partes que sean titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio válidos estarán exentos de la obtención de una visa para ingresar, transitar y permanecer en el territorio de la otra Parte por un período que no exceda los 30 (treinta) días desde la fecha de ingreso.

**Artículo 2
Duración de la validez del pasaporte**

La duración de la validez de los pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio de los nacionales de cualquiera de las Partes será de al menos 6 (seis) meses desde la fecha de ingreso al territorio de la otra Parte.

Artículo 3
Restricción de visas

Los titulares de los pasaportes válidos de cualquiera de las Partes a los que se refiere el presente Acuerdo podrán ingresar y salir del territorio de la otra Parte por cualquier punto autorizado para tal fin por las autoridades de inmigración competentes, sin restricciones salvo las establecidas en las disposiciones de seguridad, migratorias, aduaneras y sanitarias y otras que puedan ser legalmente aplicables a los titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio y oficiales.

Artículo 4
Visa para miembros de misiones diplomáticas y consulares

Los nacionales de cualquiera de las Partes que sean titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio válidos y hayan sido designados como miembros de una misión diplomática o consular en el territorio de la otra Parte, incluidos sus familiares, deberán obtener la visa de ingreso correspondiente de la Embajada de la otra Parte con anterioridad a su ingreso.

Artículo 5
Derechos de las autoridades

1. El presente Acuerdo no eximirá a los nacionales de ninguna de las Partes de la obligación de respetar las leyes y reglamentaciones de la otra Parte con relación al ingreso, la permanencia y la salida de extranjeros.
2. Las Partes se reservan el derecho de denegar el ingreso o acortar la estadía de las personas consideradas indeseables o que puedan poner en peligro la paz pública, el orden público, la salud pública o la seguridad nacional.

Artículo 6
Suspensión

Cualquiera de las Partes podrá suspender el presente Acuerdo en todo o en parte por razones de seguridad nacional, orden público o salud pública. La introducción y la eliminación de las medidas establecidas en el presente párrafo se informarán debidamente a la otra Parte dentro de los 30 (treinta) días previos por la vía diplomática.

Artículo 7
Muestra y emisión de pasaportes o documentos de viaje

1. Las Partes intercambiarán, por la vía diplomática y dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la firma del presente Acuerdo, muestras de sus pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio válidos.
2. En caso de que se introduzcan nuevos pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio o se modifiquen los existentes, las Partes se informarán mutuamente por escrito acerca de cualquier cambio, a través de la vía diplomática, como mínimo 30 (treinta) días antes de su introducción oficial.

Artículo 8
Solución de controversias

Toda diferencia o disputa que surja con relación a la interpretación o implementación de las disposiciones del presente Acuerdo se resolverá amigablemente mediante consultas o negociaciones entre las Partes.

Artículo 9
Modificaciones

El presente Acuerdo podrá ser modificado o revisado, si se considera necesario, mediante acuerdo mutuo por escrito de las Partes. Dicha modificación o revisión entrará en vigor de conformidad con las disposiciones del Artículo 10, párrafo 1 de este Acuerdo y formará parte integral del mismo.

Artículo 10
Entrada en vigor, duración y terminación

1. El presente Acuerdo entrará en vigor 60 (sesenta) días después de la fecha de recepción de la última notificación escrita por la cual las Partes se hayan informado mutuamente, a través de la vía diplomática, que se han cumplido todos los requisitos para su entrada en vigor, de acuerdo a lo estipulado por sus respectivas legislaciones nacionales.
2. El presente Acuerdo permanecerá en vigor por un período de 5 (cinco) años y se renovará automáticamente por un período adicional de 5 (cinco) años, a menos que una de las Partes decida poner fin a este Acuerdo cursando notificación por escrito a la otra Parte, por la vía diplomática, 90 (noventa) días antes de la fecha de terminación prevista.

En prueba de conformidad, quienes suscriben, habiendo sido debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo.

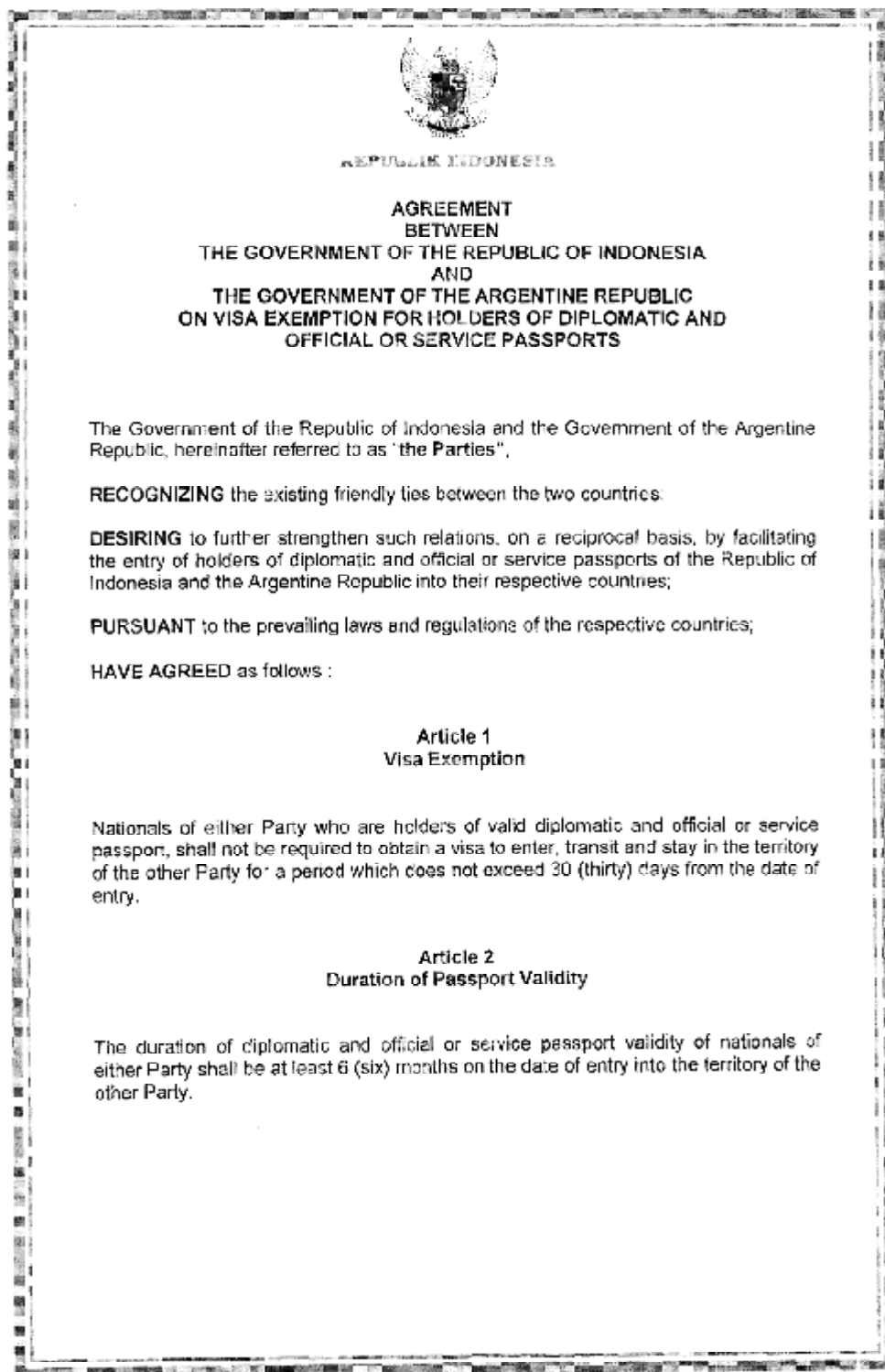
HECHO en Buenos Aires, a los 24 días del mes de agosto de 2011, en dos originales, en los idiomas indonesio, español e inglés, siendo ambos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, prevalecerá el texto en inglés.

Por el Gobierno de la
República de Indonesia


R. M. Marty M. Natalegawa
Ministro de Relaciones Exteriores

Por el Gobierno de la
República Argentina


Hector Marcos Timerman
Ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto



Article 3
Visa Restriction

The holders of the valid passports of either Party referred to in this Agreement may enter into and depart from the territory of the other Party by any point authorized for that purpose by the competent immigration authorities, without any restriction except for those stipulated in the security, migratory, custom and sanitary provisions and others which may be legally applicable to holders of the diplomatic and official or service passports.

Article 4
Visa for Member of Diplomatic and Consular Missions

Nationals of either Party who are holders of valid diplomatic and official or service passports and assigned as members of diplomatic or consular mission in the territory of the other Party, including their family members, shall be required to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the other Party prior to their entry.

Article 5
The Right of Authorities

1. This Agreement shall not exempt nationals of either Party from the obligation to respect the laws and regulations of the other Party concerning the entry, stay and exit of foreigners.
2. Either Party reserves the rights to refuse admission of entry or shorten the stay of persons considered undesirable or likely to endanger public peace, public order, public health or national security.

Article 6
Suspension

Either Party may totally or partially suspend this Agreement for reasons of national security, public order or public health. The introduction, as well as termination of the measures stated in this paragraph shall be duly informed to the other Party within 30 (thirty) days in advance through diplomatic channels.

Article 7
Sample and Issuance of Passport or Travel Document

1. The Parties shall exchange, through diplomatic channels, within 30 (thirty) days after signing of this Agreement, the specimens of their valid diplomatic and official or service passports.
2. In case of introduction of new diplomatic and official or service passports, as well as, modifications of the existing ones, the Parties shall inform each other in writing, through diplomatic channels, about any changes not later than 30 (thirty) days prior to their official introduction.

**Article 8
Settlement of Dispute**

Any differences or disputes arising out of the interpretation or implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties.

**Article 9
Amendments**

This Agreement may be amended or revised, if it is deemed necessary, by mutual written consent of the Parties. Such amendment or revision shall enter into force according to the provision of paragraph 1 of Article 10 of this Agreement, and form as an integral part of this Agreement.

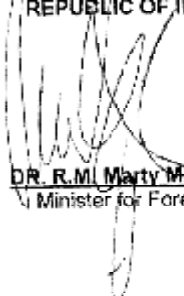
**Article 10
Entry Into Force, Duration and Termination**

1. This Agreement shall enter into force 60 (sixty) days from the date of the receipt of the last written notification in which the Parties inform each other, through diplomatic channels, that all requirements for the entry into force of this Agreement, as stipulated by their respective national legislation, have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall be automatically renewed for further period of 5 (five) years, unless either Party decides to terminate this Agreement by giving written notification to the other Party, through diplomatic channels, 90 (ninety) days prior to the expected termination date.

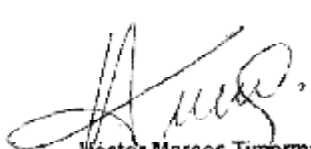
The undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in Buenos Aires on this 24th day of August of 2011, in two originals, in the Indonesian, Spanish and English languages, both being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA


DR. R. M. Marty M. Natalegawa
Minister for Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ARGENTINE REPUBLIC


Hector Marcos Timerman
Minister of Foreign Affairs, International
Trade and Worship